

**TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK OLEH PEGAWAI
PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
SELATAN No.1192/PID.B/2010/PN.JAK.SEL)**

Rifan Zidny

Abstrak

Pencurian listrik merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Berbagai cara telah dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan aksinya demi mendapatkan keuntungan-keuntungan semata. Oknum-oknum ini tidak mempertimbangkan berbagai resiko yang akan terjadi pada dirinya sendiri maupun masyarakat sekitar. Siapa sangka, dibalik pencurian listrik oleh oknum-oknum tersebut ada beberapa orang yang berasal dari ‘pegawai’ PLN itu sendiri. Jelas hal ini mempengaruhi keterbatasan pasokan tenaga listrik yang harus dipenuhi oleh PLN untuk memasok aliran listrik ke pelosok daerah yang belum terjangkau aliran listrik. Saat ini pihak PLN seharusnya dapat memperketat dalam pengawasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penggunaan tenaga listrik yang dapat merugikan pihak lain. Dan dalam penegakan keadilan pihak PLN seharusnya dapat memberikan sanksi yang tepat untuk pegawai yang terbukti melakukan tindak kejahatan pencurian listrik

Kata Kunci : Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertanggung Jawaban, Pencurian Tenaga Listrik

**THEFT CRIME OF ELECTRICITY BY EMPLOYEES PT.
STATE ELECTRIC COMPANY (PERSERO) (CASE STUDY
JAKARTA COURT RULING No.1192/PID.B/2010/PN.JAK.SEL)**

Rifan Zidny

Abstract

Theft of electricity is one of the many problems faced by the State Electricity Company (PLN). Various ways have been carried out by elements that are not responsible in the act in order to obtain benefits alone. These elements do not take into consideration the various risks that would happen to himself and the community around. Who would have thought, behind the theft of electricity by elements there are some people who come from 'employee' PLN itself. Obviously this affects the electricity supply constraints that must be met by PLN to supply electricity to remote areas not yet inaccessibility electricity. Currently the PLN should be able to tighten the supervision carried out by elements that are not responsible in the use of electric power that can merugkan other party. And the justice of the PLN should be able to provide appropriate sanctions for employees who are convicted of crimes of theft of electricity.

Keywords: State Electricity Company (PLN), Accountability, Theft of Electricity